

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggono, Bayu Dwi, Agus Riewanto, dan Jimmy Z. Usfunan. 2019. *Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.
- Badudu, J.S. 2003. *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C.S.T., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholisin. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Djazuli, H.A. 2007. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 1973. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harrison, Lisa. 2016. *Metodelogi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M. 2016. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

- K, Abdullah. 2013. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian Cetak*. Watampore: Luqman al-Hakim Press.
- Karim, Rusli. 2006. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1350 H. *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke 11*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhaimin. 1969. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. 2014. *Sunan Abu Daud*. Juz I. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: Peradaban.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Promono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2014. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Cetakan Ketiga belas*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana*

Indonesia. Yogyakarta: Laksbang.

Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Almaida, Z. (2020). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Jurnal Repertorium*, 6(2).

Arianto, Dwi & Nurliana Cipta Apsari. 2022. Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, Dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Layanan Transportasi Publik: Studi Literatur Di Berbagai Negara. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156-170.

Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49-67.

Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 757-777.

Frenki, F. (2017). Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).

Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Lasmawan, I. W. (2022). *Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory*. *Unnes Law Journal*, 8(2), 245-262.

Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116-137.

Rifai, A. (2015). Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3(06).

Salamony, Jetter Wilson. Loisa Diana Raya & Yuzon Sutrirubiyanto Nova. (2022) *The Right To Vote And Be Elected For Persons With Mental Disability In*

Indonesia Due To Revisions To General Electoral Law . Surya Kencana Tiga, 2(1).

- Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul & Amsar. (2022). Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. *SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(4), 25-40.
- Waisnawa, I. K. G. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(11), 1-12.
- Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 395-408.
- Yazfinedi, Y. (2018). Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 101-110.
- Yusdar, Y. (2019). Accessibility of Persons with Disabilities in Realizing Elections with Integrity. *Musamus Law Review*, 1(2), 105-114.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

PKPU No.11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 450 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Dokumen Hukum

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dokumen Visi Misi KPU Kabupaten Kediri.

Dokumen Susunan Anggota KPU Kabupaten Kediri.

Skripsi

Yanto, Tri Gusti. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu, 2023.

Prasetyo, Heru. “Konstitusionalitas Hak Pilih pada Penderita Gangguan Mental pada Pemilihan Kepala Daerah dalam Kerangka Konsolidasi Demokrasi Indonesia”. Skripsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Internet

Akhmad, Chairul. “Ensiklopedia Hukum Islam: Fiqh Siyasah (1),” *khazanah.republika.co.id* 22 Oktober 2012.

Tersedia pada <https://khazanah.republika.co.id/berita/mc9ofk/ensiklopedia-hukum-islam-fiqh-siyasi-1/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

- DSPPPA Belitung. “Apa itu Penyandang Disabilitas Mental,” DSPPPA Belitung 4 September 2019. Tersedia pada <https://dspppa.belitung.go.id/apa-itu-penyandang-disabilitas-mental/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.
- Firmasnyah, Anis. “2.794 ODGJ di Kediri Bisa Gunakan Hak Pilih,” *beritasatu.com* 7 Februari 2024. Tersedia pada <https://www.beritasatu.com/nusantara/2798402/2794-odgj-di-kediri-bisa-gunakan-hak-pilih>, diakses pada tanggal 22 Februari 2024.
- Hasanah, Sovia. “Apakah Orang Sakit Jiwa Berhak Memilih dalam Pemilu,” *hukumonline.com* 26 November 2018. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-sakit-jiwa-berhak-memilih-dalam-pemilu-lt5bf7a73cc679f/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.
- Manah, Fortunatus Hamsah. “Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024,” *rumahpemilu.org* 30 September 2021. Tersedia pada <https://rumahpemilu.org/aksesibilitas-pemilih-disabilitas-jelang-pemilu-2024/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- KBBI Kemendikbud. “Implementasi,” KBBI Kemendikbud. Tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.
- Safi’udin, Moh. Yusro. “Ribuan Penderita Gangguan Mental di Kediri Ikut Mencoblos Pilpres 2024,” *kediripedia.com* 20 Januari 2024. Tersedia pada <https://kediripedia.com/ribuan-penderita-gangguan-mental-di-kediri-ikut-mencoblos-pilpres-2024/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024.
- TIM Kamus Besar. “Kamus Online,” TIM Kamus Besar. Tersedia pada <https://www.kamusbesar.com/hakpilih-pasif>, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.

Sumber Wawancara

Hasil Wawancara peneliti dengan N, Penyandang Disabilitas Mental.

Hasil Wawancara dengan Bapak Nanang Qosim, *Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten*

Kediri, pada 19 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Roehan, *pemilik Yayasan Sanggar Kesehatan Jiwa Baitul Latifa*, pada 23 Januari 2024.